

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2010). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Kedua). PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulmawan, Wawan. 2019. *Business Judgment Rule BUMN*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal dan Artikel:

- “Sujawerni (2020, Juli), Analisis Profitabilitas BUMN Sebelum Dan Sesudah Privatisasi Di Indonesia”. *Jurnal MONEX Volume 9 Nomor 2* (<https://www.ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/>)
- “Akbar, M.G.G. (2016, November). *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1 (1), 1-5(journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnallimuHukum/artivlr/download/77/76)
- “Lestari, Sartika Nanda (2015, Oktober). *Business Judgment Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Sebagai Bagi Direksi Badan Usaha Milijk Negara di Indonesia. *Jurnal Notarius*. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10261>)
- “Hartono, Sriwati, W.S.D (2021, April). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin *Business Judgment Rule*”. *Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 2 (1) 23-22* (<https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.439>)
- “Lestari, R., Ikhwansyah, I., & bFaisal, P. (2018, Juni). Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin *Business Judgment Rule*. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An*, 1 (2), 236. (<https://doi.org/10.24198/acta/vli2,118>)
- “Kusmono (2016, Maret). Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip *Business Judgment Rule* Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian. *Jurnal Info Arta*, 3, 33-42 (<https://doi.org/http://dx/doi/org/10.31092/jia.v3i0>)
- “Rahayu, (2019, Juni) Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule*”. *Jurnal RechtIdee*, Edisi 14 No.1 https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/4843/pdf_1)

- “Disemadi, Yusro (Juli 2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui *Business Judgment Rule*”. *Jurnal Jurisprudence*, (<http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/11006/5935>)
- “Nasution, Bismar *Prinsip Business Judgment Rule dalam Pengelolaan Perseroan*”. Makalah Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH – Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)(diakses dari <https://bismarnasution.com/prinsip-business-judgment-rule-dalam-pengelolaan-perseroan/>)
- “Mahayani, A (2019, Februari). (Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang Merugi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (1), 1. (<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2309>)
- “Isfardiyana, Siti Hapsah (2015, Januari). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2 169-191.
- “Gabrilin, A. (2019, Juni). *Mantan Dirut Pertamina Karen Agustawan Divonis 8 Tahun Penjara*. Kompas. (<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/15393391/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-8-tahun-penjara>)

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No.106 Tahun 2007, TLN 2007 No.4756.
- Indonesia, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia, Keputusan Menteri BUMN No.Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN
- Indonesia, Putusan MK.RI Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 15/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 121K/PID.SUS/2020